



Media Title	Kompas		
Head Line	Kontroversi Bus Premium		
Date	8 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	26	Article Size	
Journalist	Nel	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Kontroversi Bus Premium

Jalur Khusus di Jalan Tol Sulit dan Melanggar Peraturan.

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penggunaan lajur khusus untuk angkutan umum di jalan tol menuai kontroversi. Kebijakan itu tidak hanya memicu resistensi pengguna jalan berbayar, tetapi juga sulit direalisasikan karena beban jalan bebas hambatan itu sudah terlalu tinggi pada pagi dan sore hari.

Kebijakan itu dalam kondisi lalu lintas jalan tol seperti sekarang ini sulit dilakukan, ujar Hasanudin, Direktur PT Jasa Marga, Senin (7/4), di Jakarta.

Jangkalan melawan arah, kata Hasanudin, menggunakan bahu jalan untuk angkutan umum saja itu juga tidak mungkin. Penggunaan bahu jalan melanggar ketentuan karena lajur itu khusus untuk kebutuhan darurat.

“Rencana penggunaan badan jalan tol pernah didiskusikan di internal Jasa Marga. Namun, rencana ini belum dapat direalisasikan karena tidak memungkinkan.”

“Jika ingin menggunakan lajur khusus untuk angkutan umum, sebaiknya didesain dari awal, bukan menggunakan lajur yang sudah ada,” kata Hasanudin.

Menanggapi itu, Direktur Pengembangan PT Jakarta Marga Jaya (JMJ) Ngurah Wirawan, mengatakan, pihaknya bisa memahami jika ada perbedaan pandangan itu. Namun, kata Ngurah, penggunaan lajur khusus untuk angkutan umum sangat memungkinkan.

Sebab, bus adalah kendaraan umum dengan penumpang banyak dan itu seharusnya mendapat prioritas di jalan tol. De-

ngan demikian, pengguna angkutan pribadi mau beralih ke angkutan umum.

Layanan premium

PT JMJ menawarkan moda angkutan *bodetabek shuttle express* yang memberi layanan premium kepada pekerja kantor. Mereka akan dijemput langsung dari kawasan permukiman ke tempat kerja.

Moda angkutan ini menawarkan kecepatan selama perjalanan karena menggunakan lajur khusus di jalan tol. “Desain moda angkutan ini memang untuk layanan premium bagi karyawan. Sederhananya seperti bus angkutan karyawan, tetapi dalam jumlah yang besar melayani dari permukiman ke tempat kerja,” kata Ngurah.

PT JMJ merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, salah satu Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta. PT JMJ sebagai koordinator sekaligus operator mengajak perusahaan otobus lain bergabung dalam konsep tersebut.

Saat ini, PT JMJ sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan otobus untuk bergabung dalam *bodetabek shuttle express*. Perusahaan itu baru PO

Dewi Sri dan PT Mayasari Bakti. Pihaknya juga terus membuka peluang perusahaan otobus lain melakukan kerja sama di bawah koordinasi PT JMJ.

Ngurah yakin, potensi pasar moda angkutan ini sangat besar. Sebab, *bodetabek shuttle express* memberi jaminan kecepatan selama perjalanan.

Pada tahap awal, *bodetabek shuttle express* akan beroperasi di rute Bintaro-Plaza Indonesia, Sentul-Epicentrum, dan Cikarang-SCBD Jalan Sudirman. Rute tersebut sudah dipertimbangkan sesuai dengan potensi pasar yang ada. Selama ini, banyak pengguna kendaraan dari kawasan itu. Mereka enggan menggunakan bus karena tidak memberi kepastian kecepatan.

Terkait dengan layanan premium, menurut Ngurah, hal tersebut sah-sah saja sebab PT JMJ merupakan perusahaan komersial. Sejalan dengan rencana ini seharusnya pemerintah juga terpacu meningkatkan layanan angkutan umum untuk masyarakat menengah ke bawah.

“Program itu tanggung jawab pemerintah. Kami ingin menawarkan alternatif lebih banyak,” kata Ngurah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin *bodetabek shuttle express* sebagai moda angkutan yang menjanjikan. Sebab, angkutan ini menawarkan konsep yang berbeda dengan moda angkutan lain.

Basuki mendukung gagasan tersebut karena memberi layanan maksimal sehingga pekerja yang tinggal di luar Jakarta akan

lebih menggunakan kendaraan umum ini ketimbang mobil pribadi. “Sepertinya moda ini menarik dan layak dikembangkan,” kata Basuki.

Sejalan dengan rencana ini, sebelumnya konsorsium swasta menawarkan pengoperasian moda metro kapsul. Moda angkutan umum berupa bus ini digerakkan dengan tenaga listrik beroperasi di jalan melayang. Namun, menurut Basuki, konsep ini sulit diterapkan. Kalaupun harus diterapkan, harus dilakukan dulu uji kelayakan yang ketat.

Memindahkan motor

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Pemprov DKI Wiriyatmoko, saat ditemui usai acara di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta, mengatakan, Pemprov DKI akan berupaya memperbaiki dan menambal moda transportasi publik, termasuk angkutan massal. Semuanya saat ini tengah dalam proses sehingga hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Namun Pemprov DKI terus berupaya mempercepatnya.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna, mengatakan, *bodetabek shuttle express* tidak akan seefektif yang dijanjikan pengagasnya. Yang paling penting saat ini bagaimana memindahkan sepeda motor yang kini berjumlah 7-8 juta unit berlalu lalang di jalanan Jakarta.

Apalagi, jika dikaitkan dengan rencana DKI menerapkan peralangan sepeda motor masuk kawasan-kawasan tertentu. Apa-

kah bus tingkat 20 unit cukup. Apakah ada lahan kosong di DKI di dekat jalan-jalan utama, seperti antara Blok M dan Bundaran HI yang bisa menampung ribuan sepeda motor.

Yayat menyarankan agar DKI fokus mengembangkan angkutan perbatasan yang akan memindahkan komuter dari kawasan di sekitar Jakarta ke tengah kota Jakarta. Menurut dia, DKI bisa memberi subsidi kepada operator agar harga tiket bisa semurah kereta api. Pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota bisa mengembangkan bisnis *park and ride* dengan harga terjangkau dengan lokasi yang aman dan nyaman.

Di dalam kota Jakarta, orang bisa naik bus transjakarta. Kalau bisa, pemerintah memberi subsidi kepada operator, semacam *public service obligation* (PSO) kepada PT KAI, melalui proses lelang. Siapa yang paling efisien, dia yang menang. “Ini pasti lebih efektif dibandingkan *bodetabek shuttle express*. Dengan sistem lelang PSO, akan ada kompetisi sehat mencegah tindak KKN dalam izin trayeknya,” kata Yayat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, semua gagasan tentang moda angkutan publik masih dalam tahap pemaparan. Pemprov DKI Jakarta secara resmi belum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak moda angkutan itu.

“Semua ide tentang angkutan publik boleh disampaikan. Namun, sebelum dioperasikan, harus melalui uji kelayakan lebih dahulu,” kata Akbar. (NEL/NDY)